



Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategis

(Studi Kasus)

Kabupaten Majalengka



Jaka Sulaksana, SP, M.Si, Ph.D

Dina Dwirayani, SP, M.EP

**Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Strategis Kabupaten
Majalengka**

Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Majalengka

Jaka Sulaksana, SP, M.Si, Ph.D
Dina Dwirayani, SP, M.EP



Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Majalengka

Penulis:

Jaka Sulaksana, SP, M.Si, Ph.D
Dina Dwirayani, SP, M.EP

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juni 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-591-2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategi Kabupaten Majalengka yang ditargetkan.

Buku dengan judul Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategi Kabupaten Majalengka ini berisikan mengenai studi komprehensif yang membahas mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Juni 2023, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I FISIOGRAFIS KABUPATEN MAJALENGKA	1
BAB II EKONOMI, SOSIAL BUDAYA KABUPATEN MAJALENGKA	5
BAB III PENTINGNYA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	13
A. Pengantar	13
B. Proses Pemecahan Masalah	18
BAB IV BASELINE DATA	34
BAB V KAJIAN KONSISTENSI RPJMD KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RPJMD DAERAH LAINNYA	57
BAB VI KAJIAN VISI MISI DENGAN PRINSIP <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i> , KESEIMBANGAN, DAN Keadilan	79
BAB VII PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAJALENGKA	113
BAB VIII PENGAWASAN MUTU	116
BAB IX PENUTUP	126
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

FISIOGRAFIS KABUPATEN

MAJALENGKA

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km² atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 Km²), dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya;
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Secara Geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat yaitu bagian Barat antara 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, bagian Timur 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan bagian Selatan 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan.

Topografis Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : landai atau dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21

persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alam yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar aliran sungai dan mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah di lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu daerah yang mempunyai kelereng curam.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl), dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 m dpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.

Berdasarkan sebaran dan struktur batuan, kondisi geologis Kabupaten Majalengka meliputi: *Aluvium* seluas 17.162 Ha (14,25%), *Pleistocene Sedimentary Facies* seluas 13.716 Ha (13,39%), *Miocene Sedimentary Facies* seluas 23,48 Ha (19,50%), *Undifferentiated Volcanic Product* seluas

51.650 Ha (42,89%), *Pliocene Sedimentary Facies*, seluas 3.870 Ha (3,22%), *Liparite Dacite* seluas 179 Ha (0,15%), *Eosene*, seluas 78 Ha (0,006%), *Old Quaternary Volkanik Product* seluas 10.283 Ha (8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur.

Kondisi Hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. *Air permukaan*, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. *Air Tanah*, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik.

Penggunaan Lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Berdasarkan data sekunder, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan Tahun 2011 didominasi (terbesar) adalah lahan non sawah, yaitu seluas 68.528 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan sebagai tegal/kebun seluas 26.946 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 17.217 Ha. Penggunaan lahan sawah seluas 51.896 Ha merupakan

penggunaan lahan terbesar kedua, walaupun demikian jika dilihat lebih rinci dari data tersebut di atas menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Majalengka adalah pada sektor pertanian (sulaksana, 2011; Sulaksana, 2011).

BAB II

EKONOMI, SOSIAL BUDAYA

KABUPATEN MAJALENGKA

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 4,042 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 4,854 triliun pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata-rata 4,66% per tahun.

Tabel 2.1. PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012*
1.	PDRB (milyar rupiah)	4.042	4.233	4.427	4.634	4.854
2.	Laju PDRB (%)	4,57	4,73	4,59	4,67	4,74

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.

*) Data sementara

Selama periode 2008-2012, sektor Pertanian yang merupakan penyumbang terbesar, sektor Perdagangan terbesar kedua, Sektor Industri terbesar ketiga, dan sektor jasa terbesar ke empat. Namun kondisi ini selalu dinamis. Selama kurun waktu 2008-2012, terjadi kecenderungan menurunnya kontribusi sektor pertanian, yang diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan yang cukup signifikan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor perdagangan.

Perkembangan perekonomian tersebut diikuti oleh membaiknya indikator sosial ekonomi yakni tingkat

kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus menurun yaitu 225.270 jiwa atau 18,79 % pada tahun 2008 menjadi 169.800 jiwa atau 14,14 % pada tahun 2012. Namun indikator sosial ekonomi lainnya yakni Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan sangat tidak memuaskan. Angka Koefisien Gini terus meningkat selama kurun waktu 2008-2013, berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (i) mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selama 2008-2012, setiap tahunnya dilaksanakan Festival Seni dan Budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya.

Sesuai arahan Permendagri No 54 Tahun 2010, secara keseluruhan struktur isi RPJMD mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
4. Analisis Isu Isu Strategis
5. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
6. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan
7. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
8. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Pagu

9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

10. Penutup

Obyek KLHS adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Komponen tersebut merupakan ruhnya sebuah RPJMD yang menunjukkan bagaimana pembangunan akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian yang akan disajikan dalam bagian ini adalah komponen visi sampai program pembangunan daerah.

Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018 yaitu :

“MAJALENGKA MAKMUR”

Makmur secara harfiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spiritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya. Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR adalah : “terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka secara berkelanjutan yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius.”

Berdasarkan visi di atas, telah disusun misi, tujuan dan sasarannya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Rumusan Misi beserta Tujuan dan Sasarannya.

Misi	Tujuan	Sasaran
I. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.	Tujuan 1: Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul dan akses yang terjangkau dan merata 2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan 4. Mengokohkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial
II. Membangun Perekonomia	Tujuan 1: Mewujudkan	1. Jawa Barat Sebagai Daerah

n Yang Kokoh dan Berkeadilan	pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	Pertanian Agrikultur 2. Meningkatnya daya saing usaha Pertanian 3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi 4. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas wirausahawan 5. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional
III. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan , Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik	Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan
	Tujuan 2: Terwujudnya pemerintahan yang modern	1. Meningkatnya kualitas pemanfaatan IPTEK untuk

		efektivitas dan efisiensi tata kelola Pemerintahan
	Tujuan 3: Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten	1. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur
	Tujuan 4: Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum	1. Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum
IV. Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan	Tujuan 1: Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana
	Tujuan 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan	1. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. 2. Meningkatnya

	pelayanan dasar	percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
	Tujuan 3: Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial serta Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Tujuan 4: Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing	1. Meningkatkan kemandirian, kreativitas , aktivitas pemuda dalam pembangunan sosial kemasyarakatan

	Tujuan 5: Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan pariwisata yang berdaya saing	1. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan pariwisata yang berdaya saing
	Tujuan 6: Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia	1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

BAB III

PENTINGNYA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

A. Pengantar

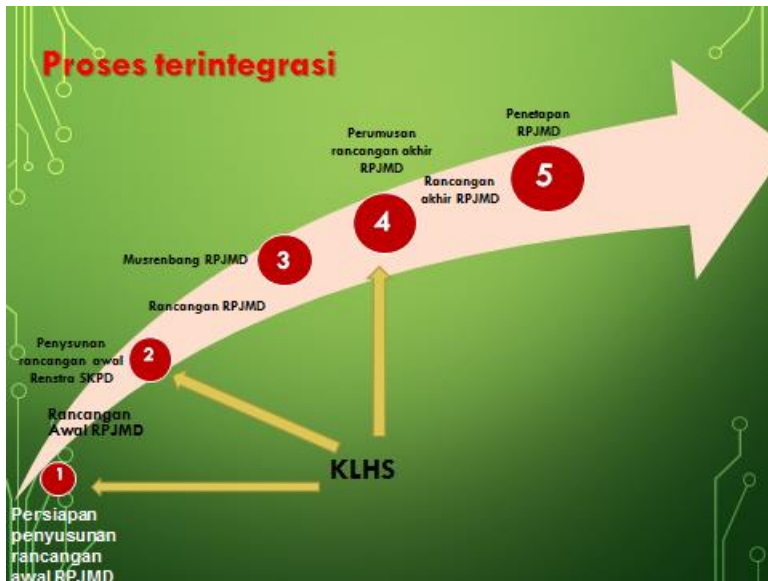
UU NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap dokumen berikut ini. Pertama, rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya. Kedua, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketiga, kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (Pasal 15, UU NO 32 Tahun 2009). Dengan adanya UU tersebut, KLHS merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat mandatory, yakni wajib dilakukan oleh para penyusun kebijakan, rencana dan program. Hal ini merupakan terobosan di tengah-tengah degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, karena unsur lingkungan sudah di pertimbangkan sejak dini pada tahap perumusan kebijakan (Fauzi, 2006; Lagiman, 2020).

Saat ini Kabupaten Majalengka tengah memasuki tahapan pembangunan jangka menengah Tahap III (2014-2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Tahap ketiga ini merupakan tahap pemantapan pembangunan

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berdasarkan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata (Saptana & Ashari, 2007).

Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran visi misi kepala daerah terpilih termasuk di dalamnya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program. Sesuai Permendagri No 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pengkajian dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program. Dengan lain kata, KLHS dilakukan terhadap seluruh isi dokumen perencanaan.

Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD Kabupaten Majalengka menggunakan pendekatan *ex-ante* yakni mengikuti proses dan mekanisme penyusunan RPJMD itu sendiri, dimana titik masuk KLHS berlangsung sejak dini yakni ketika tahap persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD. Lebih jelasnya diilustrasikan melalui Gambar 1.



Gambar 3.1. Integrasi KLHS Dalam RPJMD

Harapannya terjadi integrasi antara tim Pokja Pengendalian Lingkungan dengan Tim Penyusun RPJMD sehingga rumusan isi dokumen perencanaan terutama kebijakan dan programnya lebih berkualitas karena telah melalui kajian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Engert, Sabrina & Rauter, Romana & Baumgartner, 2015; Oudshoorn et al., 2012; Pham & Smith, n.d.).

Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2012, penyelenggaraan KLHS mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan (pembentukan Pokja PL dan TOR)
2. Pra pelingkupan (identifikasi isu-isu PB)
3. Pelingkupan (merumuskan isu-isu strategis PB berdasarkan kriteria dan bobotnya sesuai hasil kesepakatan)

4. Penyusunan base line
5. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah (isu-isu strategis PB)
6. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program
7. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

Tujuan penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Majalengka adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan. Dengan demikian diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki inisiatif mengadakan sejenis seminar kecil pra pelaksanaan KLHS. Pada kesempatan ini, melalui narasumber dari BLHD Provinsi Jawa Barat telah teridentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kabupaten Majalengka. Dan paparan dari narasumber lainnya terkait proses secara teknis implementasi KLHS RPJMD sesuai Permendagri dan pengalaman daerah lainnya.

Setelah SK Bupati Kabupaten Majalengka tentang pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan ditetapkan, tim segera melakukan konsolidasi dengan menyelenggarakan workshop pertama yakni identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dihadapi oleh Kabupaten

Majalengka. Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan KLHS harus mengikuti alur penyusunan RPJMD, sehingga secara keseluruhan waktu pelaksanaan KLHS Kabupaten Majalengka berlangsung dalam rentang waktu tiga bulan dari bulan Desember tahun 2013 hingga Februari 2014. Secara detil pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Bandung dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. FGD 1 tanggal 24 Desember 2013 merupakan tahap pra pelingkupan sekaligus pelingkupan yakni mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dihadapi Kabupaten Majalengka. Outputnya adalah daftar panjang (*long list*) dan daftar pendek (*short list*) isu-isu pembangunan berkelanjutan.
2. Mengikuti acara uji publik RPJMD sekaligus menyampaikan isu-isu strategis ke tim perumus RPJMD dan hasil sementara pengkajian visi misi.
3. FGD 2 tanggal 21 Januari 2014 melanjutkan tahap pelingkupan yakni memantapkan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan sesuai masukan stakeholders yang lebih luas termasuk LSM dan akademisi. Selain pemantapan isu-isu strategis, forum FGD ini pun dimanfaatkan untuk pengkajian pengaruh KRP terhadap isu-isu strategis. Namun proses pengkajian belum tuntas sehingga perlu dilanjutkan dalam FGD berikutnya.
4. Penyebarluasan form pengkajian pengaruh KRP terhadap isu-isu strategis ke seluruh OPD dan LSM.
5. Penyusunan baseline data terkait isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.
6. FGD 3 tanggal 20 Januari 2014 yakni penyampaian hasil KLHS di hadapan tim perumus RPJMD dalam

rangka integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka.

B. Proses Pemecahan Masalah

Pada tahap ini, terdapat tiga kegiatan utama yakni pembentukan tim Pokja Pengendali Lingkungan, penyusunan TOR dan rencana detil kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Majalengka. Sesuai amanat Permendagri No 67 Tahun 2012, fungsi Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara:

- a. saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJPD dan RPJMD dengan Kelompok Kerja lain di bawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD;
- b. melibatkan pemangku kepentingan

Dengan demikian keberadaan pokja tersebut akan menjadi pengimbang substansi rumusan RPJMD mulai dari visi, misi, strategi, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan melalui pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain hal-hal di atas, pihak BAPPEDA Kabupaten Majalengka juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi KLHS yang dikemas dalam sebuah FGD. Acara tersebut menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama membahas isu-isu lingkungan di Kabupaten Majalengka dalam perspektif Provinsi Jawa Barat dan narasumber kedua menyampaikan proses implementasi KLHS RPJMD. Acara tersebut dihadiri oleh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka, mulai dari unsur pemerintahan sampai akademisi dan LSM. Kesempatan tersebut menjadi media untuk pengenalan awal terkait dengan konsep KLHS.

Tahap Pra Pelingkupan

Secara substansi dan proses, tahap pra pelingkupan merupakan tahap awal terkait penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Majalengka. Sisi substansi, pada tahap ini sudah mulai dilakukan identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dihadapi oleh Kabupaten Majalengka. Sedangkan dari sudut proses, identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan dilakukan secara partisipatif melalui forum FGD yang diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2013. Tahap ini diikuti oleh perwakilan dari SKPD-SKPD yang terkait. Proses FGD sendiri berlangsung dengan membagi peserta ke dalam dua kelompok diskusi. Dari proses tahap pra pelingkupan ini dipersiapkan daftar isu panjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Permendagri No 67 Tahun 2012, identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan mencakup isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi. Luasnya cakupan isu mendorong para peserta FGD mengungkapkan pandangan dan pemahamannya tentang masalah pembangunan di Kabupaten Majalengka dari ketiga sudut tersebut, sehingga diperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang cukup banyak sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Isu-isu yang muncul diklaster per tema, mencakup tema sumberdaya air, Lahan dan Tata ruang, Udara, Sampah, Sosial, Ekonomi dan Sosial ekonomi. Dari tujuh tema tersebut muncul isu sejumlah 20 dengan deskripsi tertuang dalam Tabel 1. Proses penjaringan daftar isu panjang dan deskripsinya berlangsung secara partisipatif yakni keaktifan para peserta FGD, tanpa dominasi fasilitator.

Tabel 3.1. Daftar Isu Panjang Pembangunan Berkelanjutan

No	Tema	Isu	Deskripsi Isu
1	Sumber Daya Air	Ketersediaan air bersih	Merupakan kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi ketersediaannya saat ini menjadi terbatas Bergantung pada pasokan dari daerah lain (DAS Cimanuk) Adanya kompetisi yang tinggi dalam hal pemanfaatan air
		Pencemaran sungai	Pencemaran air dari pabrik pencelupan jeans di Kecamatan Cikijing
		Pencemaran air	Adanya penggilingan batu di daerah Rajagaluh yang menghasilkan endapan dan mencemari lahan pertanian warga setempat Limbah dari pengeksplotasian minyak bumi di Sumber Jaya Limbah pabrik tahu, oncom, dan tempe

No	Tema	Isu	Deskripsi Isu
			yang sering kali dibuang sembarangan ke sungai
2	Lahan dan Tata ruang	Lahan kritis	Luas lahan kritis mencapai 500.000 ha Menurunkan produktivitas lahan padahal sebagian besar area lahan kritis merupakan perkebunan dan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Program penanaman tanaman keras di lahan kritis berdampak kontraproduktif Adanya ancaman terhadap Jatigede Memiliki dampak terhadap daerah hilir (bencana)
		Alih fungsi lahan	Tingginya pengalihfungsian lahan terutama dari hutan primer, hutan sekunder dan sawah menjadi area